

Penulis mengambil judul “Kebijakan Perancis dalam Program Pengembangan Senjata Nuklir Pasca Perang Dingin” dalam penulisan skripsi ini dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Senjata nuklir tidak hanya digunakan oleh banyak negara sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk menaikkan prestise suatu negara.
2. Sebagai salah satu negara nuklir di Eropa Barat, Perancis merupakan negara yang dianggap memiliki kebijakan dibidang nuklir yang sulit dimengerti, tidak saja oleh negara-negara non-nuklir tetapi juga oleh sesama negara nuklir.
3. Judul tersebut belum pernah dijadikan penulisan skripsi mahasiswa lain.

B. Latar Belakang Masalah

Pada masa Perang Dingin isu tentang masalah nuklir merupakan isu yang paling banyak diperbincangkan. Senjata nuklir¹ hanya dimiliki oleh sedikit sekali negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan China. Kelima negara ini kemudian ditetapkan sebagai Negara Pemilik Senjata Nuklir² (*Nuclear Weapon States*). Salah satu negara nuklir yang masih mengembangkan senjata nuklir dan mempertahankan kepemilikan arsenal nuklir adalah Perancis.

¹ Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat - sebiji bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir telah digunakan hanya dua kali dalam pertempuran - semasa Perang Dunia II oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang Hiroshima and Nagasaki. Untuk lebih lengkapnya lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_Nuklir

² Negara pemilik senjata nuklir yang dikonfirmasi adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Republik Rakyat China, India, dan Pakistan. Selain itu, negara Israel dipercaya mempunyai senjata nuklir walaupun tidak diini dan Israel enggan menkonfirmasi apakah memiliki senjata nuklir atau

Perancis terletak di Eropa Barat, berbatasan dengan teluk Biscaye dan Selat Inggris (*La Manche*) antara Belgia dan Spanyol, tenggara Britania Raya. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, antara Italia dan Spanyol.³ Perancis masuk ke dalam Kepulauan Mediterania Corsica yang dibagi menjadi 22 wilayah, termasuk Brittany dan Burgundy, wilayah sekitar Dijon.

Nuklir Perancis telah dimulai sebelum Perang Dunia II. Pada periode di antara dua perang dunia tersebut, perkembangan nuklir sangat pesat di Perancis. Jenderal de Gaulle mempelajari metode pengembangan nuklir Amerika beserta implikasi militernya. Lalu pada tahun 1945, setelah pemboman Nagasaki dan Hiroshima, ia mengambil keputusan untuk mendirikan Komisariat Energi Atom (*Atomic Energy Commissariat, AEC*).

Ketidak stabilan Republik Keempat di Perancis setelah perang dan kurangnya dana telah menghambat penelitian dan pengembangan nuklir Perancis. Dalam beberapa tingkatan, bantuan Amerika juga mencegah Perancis dari penggunaan energi nuklir untuk keperluan militer. Rencana lima tahun pertama pembangunan energi atom dibuat oleh Felix Gaillard, anggota pemerintahan Pinay (Maret 1952 – Januari 1953) yang difokuskan pada usaha untuk mengatasi defisit Perancis di bidang energi. Rencana tersebut bertujuan untuk memproduksi 50 kilogram Plutonium setiap tahunnya dan menurut teori, bisa menciptakan enam sampai delapan bom nuklir.

Pada tanggal 5 Desember 1956, secara rahasia komite untuk aplikasi militer energi atom dibentuk. Komite ini berguna sebagai penghubung antara Komisariat

³ Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/perancis>

Energi Atom dan Kantor Militer Pemerintah. Pada 5 Oktober 1956, Perancis mendapat tawaran untuk mengembangkan program pengembangan pesawat peluncur bom. Akhirnya program tersebut diresmikan pada 19 Desember 1956 untuk kebijakan strategis bom nuklir.

Kembalinya Jenderal de Gaulle setelah krisis 13 Mei 1958 menandai berakhirnya keraguan Perancis dalam masalah senjata nuklir. Pilihan Perancis sudah ditentukan, pada pertemuan Dewan Pertahanan tanggal 17 Juni 1958, de Gaulle mengumumkan tanggal uji coba bom pertama Perancis dan memutuskan untuk mempercepat program pengembangan senjata nuklirnya. Pada bulan September 1958, de Gaulle diminta oleh aliansi untuk menginformasikan program nuklir mereka dan bergabung dengan komando aliansi. Tentu saja hal ini ditolak oleh de Gaulle. Baginya senjata nuklir merupakan perpanjangan dari independensi politik nasional. Ia menyadari senjata nuklir merupakan jaminan keamanan negara yang digunakan sebagai kekuatan penangkal (*deterrence*) yang mampu menjadi penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan lain.

Pada tahun 1960, Perancis merupakan negara keempat yang memproduksi senjata nuklir, sukses melakukan uji coba bom atom di Reggane, gurun pasir Sahara, Algeria. Pada tahun 1968, para ilmuwan Perancis berhasil meledakkan bom hidrogen, secara mandiri tanpa bantuan Amerika. De Gaulle menyatakan Perancis sebagai kekuatan nuklir ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 1965, Perancis meluncurkan satelit pertamanya dan menetapkan diri sebagai

... ..

Secara keseluruhan terdapat 50 uji coba nuklir di atmosfer dan 160 uji coba di bawah tanah dan di atol yang terjadi antara tahun 1960 dan 1991 di Mururoa dan Fangataufa. Sekedar tambahan di Sahara, Perancis telah melakukan 192 uji coba hingga tahun 1992. Perancis meledakkan nuklir pertama kali pada tahun 1960, bom negara nuklir lain seperti Uni Soviet, pertama kali diledakkan pada tahun 1949, Inggris pada tahun 1952, dan China pada tahun 1966. secara bergantian negara-negara ini memperbanyak jumlah bom, pesawat tempur, pangkalan rudal, kemudian rudal yang digunakan oleh angkatan laut.

Pada 8 April 1992, Presiden Francois Mitterand melalui Perdana Menteriya mengumumkan suspensi dari uji coba nuklir Perancis tahun itu. Kemudian memulai moratorium uji coba nuklir yang ditanda tangani oleh tiga negara nuklir lainnya yaitu AS, Inggris, dan Rusia. Sedangkan China tidak ikut menandatangani moratorium tersebut. Keputusan itu diambil untuk menjaga hubungan baik antara sesama negara nuklir tersebut. Namun, pada 13 Juni 1995, Chirac mengumumkan bahwa uji coba nuklir Perancis diaktifkan kembali. Presiden Perancis mengumumkan secara serentak bahwa Perancis akan menyelesaikan kampanye terakhir dari uji coba di Pasifik, baru kemudian Perancis akan menandatangani *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)*.

Kebijakan nuklir Perancis sulit dimengerti, tidak saja oleh negara-negara non-nuklir, tetapi juga oleh sesama negara nuklir. Contohnya pada tanggal 4 Agustus 1963, Perancis menolak menanda tangani Pakta Pelarangan uji coba nuklir di Moskow, karena negara ini mengkhawatirkan dunia dengan kekuatan nuklir yang

... Kemudian setelah meledakkan nuklir pertamanya pada tahun 1960

seperti diketahui, ketika negara-negara nuklir (AS, Rusia, Inggris) telah menyatakan moratorium terhadap uji coba nuklir mereka, Perancis tetap melaksanakan program uji coba nuklirnya di kawasan Asia Pasifik.

Uji coba nuklir Perancis yang cukup besar terjadi di sepanjang tahun 1995, ketika Jacques Chirac masih melaksanakan program 100 harinya. Walaupun uji coba tersebut selalu menimbulkan reaksi unjuk rasa di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara pasifik, ternyata Perancis sempat menuntaskan uji coba nuklirnya hingga lebih dari empat kali dengan cara dilakukan di bawah tanah menggunakan bom hidrogen di atol Mururoa⁴ di kawasan Pasifik. Biaya yang dikeluarkan sekitar 16 juta dollar AS dalam setiap percobaannya.⁵

Gelombang demonstrasi terhadap uji coba Perancis di Atol Mururoa diperkirakan merupakan gerakan unjuk rasa paling besar, karena dilakukan oleh berbagai bangsa dan berbagai kelompok umur. Di Eropa, kesebelasan Swiss menggelar spanduk protes terhadap Chirac sebelum mereka bertanding di Gottenburg, Swedia. Di Chili, negara yang merasa paling langsung memperoleh dampak fisik percobaan tersebut, seluruh rakyatnya menghentikan kegiatan mereka guna melancarkan protes anti-Perancis. Namun, Presiden Jacques Chirac tidak mengindahkan aksi-aksi protes yang dilakukan, ia bahkan mengecam protes tersebut dan meneruskan uji coba berikutnya. Ia beragumen bahwa program nuklir Perancis dilaksanakan untuk memberi manfaat bagi keamanan wilayah Eropa.

Munculnya Jacques Chirac telah menghidupkan kembali uji coba nuklir Perancis. Menurut laporan Komisi Pertahanan Perancis yang dipimpin oleh Rene

Galy-Dejean menyebutkan bahwa Perancis harus melanjutkan uji coba nuklir untuk mengatasi keteringgalan nuklir Perancis. Bagi Chirac keputusan untuk melanjutkan tes nuklir tersebut merupakan keputusan tertinggi Perancis yang sudah final dan tidak dapat diubah lagi (*ir-revocable*).

Di bawah tekanan dan protes internasional, terutama yang datang dari negara-negara Eropa dan Pasifik, Perancis menghentikan rangkaian uji coba nuklirnya yang baru saja dilakukan enam uji coba dari yang sebelumnya direncanakan ada delapan uji coba. Juru bicara pemerintahan mengatakan bahwa rangkaian uji coba terakhir telah selesai dilaksanakan dan mencapai tujuan yaitu memberi jaminan keamanan dan reliabilitas dari pertahanan Perancis. Presiden Jacques Chirac mengatakan :

"I know that the decision that I made last June may have provoked, in France and abroad, anxiety and emotion. I know that nuclear weaponry may cause fear. But in an always dangerous world, it acts for us as a weapon in the service of peace."

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di angkat permasalahan, yaitu : apa alasan Perancis memulai kembali uji coba nuklir di kawasan Pasifik pasca Perang Dingin ?

D. Kerangka Dasar Penelitian

Untuk dapat menganalisa permasalahan yang ada sehingga dapat mendeskripsikan, mengeksplanasi, dan meramalkan fenomena yang terjadi, maka penulis menggunakan alat analisis, yaitu : Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) yang dikembangkan oleh William D Conlin dan konsep *Deterrence*

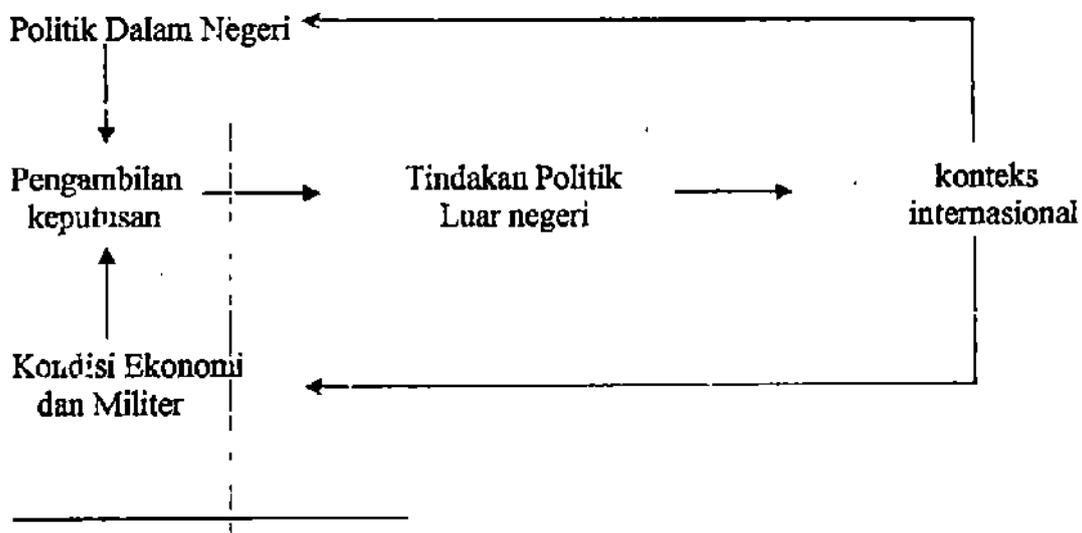
1. Teori Pengambilan Keputusan

Teori Pengambilan Keputusan ini dipandang relevan untuk menganalisa sebuah kebijakan yang dikeluarkan dan diberlakukan di suatu negara karena sebuah kebijakan selalu akan didasarkan pada pengambilan keputusan terlebih dahulu.

Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory*) menurut William D. Coplin :

Apabila kita akan menganalisa sebuah kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan politik militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi faktor pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya, ilustrasi bagan di bawah ini akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.



Ilustrasi skema tersebut di atas menjelaskan interaksi ketiga variabel sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri suatu negara yang dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan teori tersebut akan digunakan untuk menjelaskan mengapa Perancis mengambil kebijakan untuk meningkatkan program pengembangan senjata nuklirnya pasca Perang Dingin.

2. Konsep Deterrence

Konsep *deterrence* (penangkalan) pada awalnya muncul sejalan dengan persenjataan nuklir sebagai "primadona" persenjataan pada masa Perang Dingin. *Deterrence* secara umum diartikan sebagai kemampuan suatu negara menggunakan ancaman kekuatan militer untuk mencegah negara lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, dengan meyakinkan bahwa biaya yang harus ditebusnya jauh lebih besar dibanding peluang keuntungan politik yang diraihnya.⁷ Konsep ini pada dasarnya melandaskan diri pada *Mutual Assured Destruction* (MAD) yang merujuk pada suatu kondisi bahwa apabila terjadi perang nuklir maka pihak-pihak yang terlibat dalam perang tersebut akan hancur. Dengan kata lain penggunaan dan pengembangan persenjataan nuklir lebih diarahkan pada konsep "*no first use*".⁸

Menurut Y. Harkabi :

"...deterrence is persuading te dererred that his own interest compels him to desist from committing a certain act. Such persuasion is achieved by calculation of gain against loss...To make deterrence effective, the deterrer

⁷ Kusnanto Anggoro, *Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Penangkalan Pasca Perang Dingin, dalam Pengembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Juwono Sudarsono, dkk, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 71-75.

makes certain that the level of retaliation (that is, the level of damage to be inflicted)."⁹

Definisi lain tentang deterens:

"Deterrence is the prevention from action by fear of the consequences. Deterrence is a state of mind brought about by the existence of a credible threat of unacceptable counteraction."¹⁰

Dari pengertian di atas, nampak asumsi pokok dari konsep *deterrence* bahwa penangkalan adalah suatu strategi yang bersifat defensif, dengan kata lain konflik strategis baru berlangsung pada saat atau setelah terjadi serangan pertama (*first strike*) pihak lawan. *Deterrence* sendiri pada hakekatnya diformulasikan sebagai upaya penggetar pihak lawan, hal inilah yang membedakan dengan *defense* yang lebih bersifat fisik dan berfungsi ketika perang pecah. Misalnya tank bergerak ke garis depan, sehingga membuat musuh secara fisik tidak mungkin maju. Dengan kata lain, begitu perang terjadi, berarti *deterrence* gagal dan harus digantikan dengan strategi pertahanan.¹¹

Syarat nyata bagi keefektifan *deterrence* adalah :¹²

1. Kredibilitas

Salah satu syarat yang nyata bagi alat penangkal yang efektif adalah pemilikan kemampuan yang cukup untuk melakukan pembalasan yang diancamkan, dengan kata lain kemampuan meyakinkan pihak lawan untuk melakukan serangan balasan yang dapat menghancurkan pihak

⁹ Y. Harkaby, *Nuclear War and Nuclear Peace*, Israel Program for Scientific Translation, Jerosalem, 1966, hal. 9.

¹⁰ <http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doc/dict/>

¹¹ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 162-164.

¹² K. S. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Praetice Hall of India, New Delhi

lawan. *Deterrence* adalah hal terbesar di mana kekuatan militer harus dipadukan dengan kemauan yang kuat untuk dapat terlaksana, dan itu akan dicapai jika suatu negara di satu sisi bersiap untuk menghindari resiko dalam hubungannya dengan negara lain. Hal ini kurang begitu efektif ketika ada kemauan yang rendah untuk mengurangi resiko meskipun didukung oleh kemampuan dan kekuatan militer. Dengan demikian pemilikan persenjataan yang kuat, unggul, bahkan sangat besar tidak lantas menjamin kredibilitas karena kredibilitas tidak melekat pada senjata tetapi pada suatu fungsi persepsi penantang mengenai senjata dan maksud serta motivasi pemiliknya.

Jadi, kredibilitas tergantung pada keyakinan dan persepsi penantang, dan masalah yang sangat penting dalam konteks ini adalah penyampaian maksud. *Deterrence* tidak hanya merupakan teknik militer tetapi juga sebuah konsep diplomasi dengan kata lain *deterrence* memang membutuhkan 'kapabilitas militer' untuk mendukungnya. Namun, indikatornya tidak terletak pada penggunaannya melainkan pada ancaman penggunaannya.¹³

2. Stabilitas

Alat penangkal yang efektif juga harus stabil dan dapat dipercaya. Dalam hal ini kemampuan meyakinkan lawan bahwa ancaman yang dilakukannya serius dan lawan harus yakin dan tidak akan berfikir dua kali. Negara-negara yang berkonflik masing-masing memiliki kekuatan

¹³ Cf. Roy, *Diplomasi Regionalisasi Di Asia Tenggara*, 1993, hal. 107

militer yang tangguh mungkin mampu menghancurkan lawan dengan satu serangan kejutan, mungkin merasakan dirinya sendiri dalam keadaan yang sama, masing-masing dari mereka lebih suka mundur namun bisa juga tidak mampu meyakinkan pihak lain akan preferensinya.

Dengan demikian, alat penangkal yang efektif harus mampu mengancam, di mana cukup dipercaya bahwa lawan tidak tertarik untuk melakukan tindakan menyerang dan mantap yaitu cukup menentramkan untuk mengurangi segala rangsangan untuk melancarkan serangan terlebih dahulu karena takut. Penangkalan dinilai gagal jika pihak lawan beranggapan bahwa serangan pertamanya akan jauh lebih menguntungkan daripada melakukan serangan balasan. Dengan adanya kekhawatiran yang besar atas kemampuan yang rendah, merasa kurang yakin, telah menjadi satu meskipun dalam kenyataannya mereka tetap menggunakannya. Keadaan yang demikian akan membawa dampak tidak hanya fisik tetapi juga berpengaruh secara psikologis.¹⁴

Pada Pemilu bulan Maret 1995, Jacques Chirac terpilih sebagai presiden dan menyebabkan berakhirnya pemerintahan sosialis. Sebagai presiden pertama yang terpilih sejak berakhirnya Perang Dingin, Chirac mengambil langkah-langkah yang berani dalam kebijakan luar negeri berkenaan dengan nuklir. Pada awal masa pemerintahan, ia memutuskan untuk memulai kembali uji coba nuklir Perancis di Pasifik. Hal ini menyebabkan kemarahan negara-negara Asia dan juga Eropa. Kritikan dan kemarahan negara-negara tersebut tidak menyurutkan langkah Chirac

¹⁴ Henry Kissinger, *The Problems Of Limited War*, dalam John A Vasquez, *Classical International*

untuk melanjutkan uji coba nuklirnya. Chirac mengatakan bahwa kemandirian nuklir Perancis harus tetap dipertahankan agar Perancis bebas dalam mengambil pilihan dan tindakan yang dibutuhkan bagi keamanannya.

Dalam pidatonya di sekolah militer, *Ecole Militaire Paris* tanggal 23 Februari 1996, Chirac mengatakan :

"We must take advantage of the respite offered by the current strategic situation to rethink our nuclear posture. The choice of our means must be based on the principles of sufficiency and credibility which have, moreover, always been ours."¹⁵

Kepemilikan senjata nuklir akan menaikkan posisi tawar menawar negara yang bersangkutan, terutama jika harus berhadapan dengan negara besar. Namun di sisi lain, tidak ada satu negarapun yang akan merasa aman bila negara rivalnya mengembangkan senjata yang sama. Sehingga selalu saja ada beberapa negara yang terus mengembangkannya meski di sisi lain ada upaya mencegah proliferasinya bahkan hingga upaya pelucutan dan pemusnahan senjata nuklir. Jadi, sebelum sistem internasional tertata dan berubah di mana semua negara benar-benar menghilangkan senjata nuklir sebagai alat pertahanan mereka, serta menghapuskan keinginan untuk memiliki dan mengembangkan senjata nuklir, maka proses *disarmament* dan non-proliferasi nuklir belum bisa benar-benar efektif.

E. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan kerangka dasar pemikiran di atas, maka dapat ditarik hipotesa sebagai kesimpulan sementara bahwa :

Alasan Perancis memulai kembali program uji coba nuklirnya yaitu mempertahankan senjata nuklir sebagai instrumen deterens yang utama untuk menangkal ancaman bangkitnya militer Jerman dan ancaman terorisme internasional.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi yang berjudul "*Kebijakan Perancis dalam Program Pengembangan Senjata Nuklir Pasca Perang Dingin*" adalah :

1. Skripsi ini berusaha untuk menjelaskan secara eksplanatif tentang apa faktor yang menyebabkan Perancis meningkatkan program senjata nuklirnya pasca Perang Dingin.
2. Menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah terhadap realitas yang ada sehingga dapat mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena yang ada dan sebagai syarat memperoleh derajat Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library research*), yaitu menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal, laporan media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya termasuk data yang diperoleh dari berbagai *website* yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori atau konsep yang tepat, sehingga didapat analisa yang akurat atas permasalahan yang ada.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa, maka penelitian ini memerlukan batasan. Penelitian ini difokuskan pada uji coba senjata nuklir Perancis pada masa pemerintahan Jacques Chirac (1995 – 1996) yaitu pasca Perang Dingin, di mana muncul kontroversi seputar dilanjutkannya uji coba nuklir Perancis di kawasan Pasifik. Namun ada kemungkinan penulis akan sedikit menyinggung masalah di luar kurun waktu tersebut, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

L. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan antara satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan erat sehingga pada hasilnya dapat diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis.

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Konsep Dasar Penelitian, Maksud dan Tujuan

Penelitian, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TAHAP AWAL PROGRAM SENJATA NUKLIR PERANCIS

Dalam bab ini akan diuraikan awal mula program senjata nuklir dijalankan yaitu pada masa pemerintahan Charles de Gaulle, uji coba yang pernah dilaksanakan, kebijakan Perancis dalam bidang Program Pengembangan Senjata Nuklir, serta posisi Perancis dalam NPT dan CTBT.

BAB III. PROGRAM NUKLIR PERANCIS MASA PEMERINTAHAN JACQUES CHIRAC

Dalam bab ini akan diuraikan kebijakan pertahanan keamanan Perancis masa Chirac, program uji coba nuklir Perancis di kawasan pasifik tahun 1995, kronologi uji coba, penolakan, protes, kritik dan reaksi dunia, serta alasan Perancis menghentikan program uji coba nuklirnya masa pemerintahan Jacques Chirac.

BAB IV. ALASAN PERANCIS MENINGKATKAN ARSENAL NUKLIR SEBAGAI INSTRUMEN DETERENS UTAMA PERANCIS PASCA PERANG DINGIN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang alasan yang menyebabkan Perancis meningkatkan program pengembangan senjata nuklirnya di kawasan Pasifik.

BAB V. KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan uraian singkat dari

bab-bab sebelumnya dan juga